

Efektivitas Program Perlindungan Sosial Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB)

The Effectiveness of Social Protection Programs on Poverty Reduction in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB)

M. Habib Isma'il Basyri¹, Ambar Sari Dewi², Heru Pajriyadi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*e-mail: habibismailbasri@gmail.com¹, ambar.dewi@uin-suka.ac.id², hpajriyadi@gmail.com³

Received: 10.07.2026	Revised: 03.08.2026	Accepted: 10.08.2026	Available online: 04.09.2026
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of social protection programs in reducing poverty in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB), Indonesia. Although the poverty rate in NTB has shown a declining trend, it remains higher than the national average. Social protection programs, such as the Family Hope Program (PKH), the Food Assistance Program, and cash transfer assistance, serve as important government instruments to improve the welfare of low-income communities. This research employs a descriptive qualitative method, using data collected through document analysis of reports from Statistics Indonesia (BPS), government policy documents, and relevant scientific literature. Data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that social protection programs contribute to poverty reduction by decreasing household expenditure burdens and improving access to basic services. However, their effectiveness is still constrained by targeting accuracy, inter-agency coordination, and the economic vulnerability of communities. Therefore, strengthening data systems and integrating social protection programs are necessary to achieve sustainable poverty reduction.*

Keywords: *social protection, poverty, policy effectiveness.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program perlindungan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Meskipun tingkat kemiskinan di NTB menunjukkan tren penurunan, angkanya masih berada di atas rata-rata nasional. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan bantuan tunai menjadi instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan pemerintah, dan berbagai literatur ilmiah. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, efektivitas program masih menghadapi kendala berupa ketepatan sasaran, koordinasi antarinstansi, dan kerentanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan dan integrasi program untuk mendukung penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kata kunci: perlindungan sosial, kemiskinan, efektivitas kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang cukup serius, baik di tingkat global maupun nasional. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir angka kemiskinan mengalami penurunan, kenyataannya kesenjangan kesejahteraan dan kerentanan ekonomi di masyarakat masih cukup tinggi. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus menjalankan berbagai program perlindungan sosial sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga daya beli kelompok rentan. Program seperti bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. (April et al. 2025)

Di tingkat nasional maupun daerah, keberhasilan program perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta kondisi sosial ekonomi

masyarakat setempat. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa data kemiskinan yang akurat dan terbaru sangat diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Artinya, kebijakan perlindungan sosial tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga evaluasi yang berkelanjutan agar dampaknya terhadap penurunan kemiskinan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kemiskinan masih menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan daerah. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB masih berada pada angka dua digit, yang menandakan masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Selain itu, setiap kabupaten dan kota di NTB memiliki karakteristik serta tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Perbedaan ini membuat efektivitas program perlindungan sosial juga bisa berbeda di tiap wilayah. Karena itu, kajian yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah menjadi penting untuk memahami persoalan kemiskinan secara lebih mendalam. (Fahrurrozi 2023)

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, persentase penduduk miskin di NTB pada September 2023 tercatat sebesar 13,85%, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional. Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wilayah di NTB juga menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan mengalami penurunan, kondisi tersebut tetap membutuhkan perhatian melalui kebijakan yang efektif dan tepat sasaran agar penurunan yang terjadi bisa berlangsung secara berkelanjutan. (PUSPAWATI 2026)

Pemerintah sendiri telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program-program ini ditujukan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Bank Dunia menyebutkan bahwa sistem perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Namun, keberhasilan program tersebut tetap sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, kualitas pelaksanaan program, dan koordinasi antarinstansi di tingkat daerah. (Resnawaty 2016)

Kabupaten Lombok Tengah juga menghadapi tantangan yang sama dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Penurunan angka kemiskinan memang menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi tingkat kemiskinan di daerah ini masih tergolong cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program perlindungan sosial perlu dilakukan secara lebih mendalam. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana program yang telah dijalankan benar-benar efektif dalam membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. (Annisa 2023)

Permasalahan ini menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di tingkat daerah. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah selama ini sering dikaitkan dengan berbagai program pemerintah, baik program pengentasan kemiskinan maupun perlindungan sosial. Namun, belum dapat diketahui secara pasti seberapa besar pengaruh langsung dari program-program tersebut dibandingkan dengan faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi inflasi, maupun perubahan pola pengeluaran rumah tangga masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas efektivitas program perlindungan sosial di tingkat lokal.

Karena itu, penelitian mengenai efektivitas program perlindungan sosial terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana program perlindungan sosial benar-benar berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan mampu mendukung penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program perlindungan sosial terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program perlindungan sosial serta efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara menyeluruh berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada angka atau data statistik, tetapi juga pada proses, pelaksanaan program, dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami situasi penelitian secara lebih kontekstual dan mendalam. (Widiyana, Mansyur, and Mulhimmah 2025)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data tersebut meliputi laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan pemerintah daerah, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan kemiskinan dan perlindungan sosial. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data juga membantu peneliti dalam melihat perkembangan kondisi kemiskinan dan pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai objek penelitian. (Nadia, Rakhman 2025)

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan antara pelaksanaan program perlindungan sosial dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah secara lebih mendalam dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sisi tren statistik, terjadi penurunan angka kemiskinan baik secara nasional maupun regional. Penurunan ini menunjukkan adanya kontribusi kebijakan pemerintah, termasuk program perlindungan sosial, dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah, garis kemiskinan selama periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh lima menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun dua ribu sembilan belas, garis kemiskinan tercatat sebesar empat ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah per kapita per bulan dan meningkat menjadi lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah per kapita per bulan pada tahun dua ribu dua puluh lima (BPS Lombok Tengah, dua ribu dua puluh lima). Peningkatan ini mencerminkan naiknya nilai kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Secara konseptual, garis kemiskinan merepresentasikan ambang batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi agar seseorang tidak dikategorikan miskin. Dengan demikian, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika inflasi dan perubahan harga komoditas pokok. (Haritani and Pd 2025).

Tabel Jumlah Penurunan Kemiskinan Di Lombok Tengah 2019-2025

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (%)	Persentase Penduduk miskin (%)	Perubahan (%)
2019	128,82	13,63	-
2020	128,10	13,44	-0,19

2021	131,94	13,44	0,00
2022	128,00	12,89	-0,55
2023	129,74	12,93	+0,04
2024	122,32	12,07	-0,86
2025	109,25	10,68	-1,39

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah 2025

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami tren **menurun** selama periode 2019–2025, meskipun sempat berfluktuasi akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,63%, kemudian turun menjadi 13,44% pada tahun 2020. Tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan persentase, meskipun jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 131,94 ribu jiwa, yang mencerminkan dampak lanjutan pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.(BPS 2024)

Mulai tahun 2022, kondisi kemiskinan kembali mengalami perbaikan dengan penurunan menjadi 12,89%, meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 12,93%. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 ketika angka kemiskinan turun menjadi 12,07%, kemudian kembali menurun tajam pada tahun 2025 hingga mencapai 10,68% atau sekitar 109,25 ribu jiwa. Penurunan sebesar 1,39 poin persentase dalam satu tahun ini merupakan penurunan terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah(Darmawan 2026)

Kenaikan garis kemiskinan tersebut bersifat fluktuatif jika dilihat dari persentase kenaikan tahunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar kurang lebih delapan koma tiga puluh enam persen, sementara pada tahun dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh lima terjadi perlambatan menjadi kurang lebih lima koma empat puluh delapan persen dan tiga koma lima puluh lima persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang signifikan pada periode dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga. Inflasi, terutama pada komoditas pangan, berkontribusi terhadap peningkatan nilai kebutuhan minimum. Namun, perlambatan pada dua tahun terakhir mengindikasikan stabilisasi harga kebutuhan dasar. Stabilitas ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin.

Di sisi lain, meskipun garis kemiskinan meningkat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan pada Maret dua ribu dua puluh lima tercatat sebesar sepuluh koma enam puluh delapan persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran dua belas persen (BPS Lombok Tengah, dua ribu dua puluh lima). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan secara agregat. Namun demikian, angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar sembilan koma tiga puluh enam persen pada September dua ribu dua puluh tiga (BPS, dua ribu dua puluh empat). Hal ini menunjukkan bahwa Lombok Tengah masih menghadapi tantangan struktural dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, analisis efektivitas kebijakan menjadi penting.(Syawie 2013)

Dalam perspektif teori kemiskinan, pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan minimum konsumsi(BPS 2024). Kenaikan garis kemiskinan berarti standar kebutuhan minimum juga meningkat. Jika pendapatan masyarakat tidak meningkat secara proporsional, maka risiko peningkatan jumlah penduduk miskin akan semakin besar. Namun, data menunjukkan bahwa penurunan persentase kemiskinan tetap terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang mampu menjaga daya beli rumah tangga miskin. Salah satu instrumen yang berperan adalah program perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial seperti PKH dan Program Sembako berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*). Menurut World Bank (2022), perlindungan sosial memiliki peran

strategis dalam mengurangi dampak guncangan ekonomi terhadap kelompok rentan. Bantuan tunai dan non-tunai memungkinkan rumah tangga miskin mempertahankan tingkat konsumsi minimum. Dalam konteks Lombok Tengah, bantuan sosial membantu mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan pendidikan. Dengan demikian, meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin dapat ditekan. Fungsi protektif inilah yang menunjukkan relevansi kebijakan perlindungan sosial.

Efektivitas perlindungan sosial juga dapat dilihat dari kemampuannya mencegah kemiskinan baru. Pada periode pasca-pandemi dan pemulihan ekonomi, berbagai daerah mengalami tekanan ekonomi. Namun, dengan adanya program bantuan sosial yang diperluas, konsumsi rumah tangga miskin relatif terjaga (World Bank, 2022). Kondisi ini selaras dengan tren penurunan kemiskinan di Lombok Tengah. Artinya, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai respons jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi sosial ekonomi. Meskipun demikian, dampak jangka panjang tetap bergantung pada integrasi kebijakan lain.

Namun demikian, efektivitas program tidak terlepas dari tantangan implementasi. Nugroho dkk. (2021) menekankan bahwa ketepatan sasaran merupakan salah satu kendala utama dalam program bantuan sosial di Indonesia. Kesalahan inklusi dan eksklusi dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Jika rumah tangga miskin tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, maka tujuan program tidak tercapai secara optimal. Dalam konteks Lombok Tengah, validitas data terpadu kesejahteraan sosial menjadi faktor krusial. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan perlu menjadi prioritas kebijakan daerah.

Selain ketepatan sasaran, koordinasi antarinstansi juga memengaruhi efektivitas program. Implementasi perlindungan sosial melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pendamping lapangan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi tumpang tindih atau kekosongan bantuan dapat terjadi. Integrasi data dan sistem informasi menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran bantuan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi berbagai studi kebijakan publik. Dengan tata kelola yang baik, dampak program terhadap pengurangan kemiskinan akan lebih signifikan.

Struktur ekonomi Lombok Tengah yang masih didominasi sektor pertanian dan informal turut memengaruhi dinamika kemiskinan. Pendapatan masyarakat pada sektor ini sangat bergantung pada musim dan harga pasar. Kerentanan tersebut menyebabkan masyarakat mudah terdampak fluktuasi ekonomi. Dalam situasi seperti ini, perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pendapatan. Namun, ketergantungan semata pada bantuan sosial tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. Diperlukan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih komprehensif.

Kombinasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi pendekatan yang lebih efektif. Program bantuan tunai dapat menjaga konsumsi jangka pendek, sementara pelatihan keterampilan dan akses modal dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, rumah tangga miskin tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki peluang keluar dari kemiskinan secara permanen. Strategi tersebut relevan bagi Lombok Tengah yang memiliki potensi sektor pertanian dan pariwisata. Optimalisasi potensi lokal dapat memperkuat dampak perlindungan sosial. Sinergi kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Perlambatan kenaikan garis kemiskinan pada tahun 2024–2025 menunjukkan adanya stabilitas ekonomi yang mulai tercapai. Stabilitas ini memberikan ruang bagi kebijakan perlindungan sosial untuk bekerja lebih efektif. Jika inflasi terkendali, maka bantuan sosial memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap kesejahteraan. Kondisi ini mendukung penurunan persentase kemiskinan yang terjadi pada tahun 2025. Namun demikian, tantangan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas tetap perlu diatasi. Tanpa perbaikan struktural, risiko kemiskinan akan tetap tinggi.

Dalam perspektif efektivitas kebijakan, keberhasilan program dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penurunan angka kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan

perlindungan sosial. Data menunjukkan adanya korelasi antara implementasi program dan penurunan kemiskinan di Lombok Tengah. Meskipun tidak dapat diklaim sebagai satu-satunya faktor, kontribusi program perlindungan sosial cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank (2022) mengenai peran bantuan sosial dalam menjaga konsumsi rumah tangga miskin. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu dipertahankan.

Namun, keberlanjutan tersebut harus diiringi dengan evaluasi berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan program tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kenaikan garis kemiskinan menuntut penyesuaian besaran dan cakupan bantuan. Jika nilai bantuan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, maka efektivitasnya akan menurun. Oleh sebab itu, kebijakan perlindungan sosial perlu dirancang secara dinamis. Fleksibilitas kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan meskipun garis kemiskinan terus meningkat. Kenaikan biaya hidup dapat diimbangi dengan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Namun demikian, efektivitas program masih bergantung pada kualitas implementasi, integrasi kebijakan, dan stabilitas ekonomi. Tantangan struktural daerah perlu diatasi melalui pendekatan pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan instrumen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan daerah. Data empiris dari Lombok Tengah menunjukkan bahwa kebijakan yang konsisten mampu menekan laju kemiskinan. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus terus diperbaiki melalui peningkatan akurasi data, koordinasi kelembagaan, dan sinergi program. Dengan pendekatan yang komprehensif, perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai pijakan menuju kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Dokumentasi pemerintah kabupaten lombok tengah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di kabupaten lombok tengah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan selama periode 2019–2025. Kenaikan garis kemiskinan dari

Rp404.633 per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi Rp568.910 pada tahun 2025 mencerminkan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Namun demikian, persentase penduduk miskin yang menurun hingga 10,68% pada Maret 2025 menunjukkan bahwa intervensi kebijakan, khususnya melalui program seperti PKH dan Program Sembako, mampu menjaga daya beli dan stabilitas konsumsi rumah tangga miskin.

Meskipun demikian, efektivitas program perlindungan sosial masih dipengaruhi oleh faktor ketepatan sasaran, kualitas pendataan, koordinasi antarinstansi, serta struktur ekonomi daerah yang rentan terhadap fluktuasi. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi produktif menjadi langkah strategis untuk memastikan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Meita. 2023. "Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Pengembangan Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Rarang Selatan." 24(2). doi:10.7454/jurnalkessos.v24i2.1011.
- April, Volume Nomor, Administrasi Publik, Institut Ilmu, and Manajemen Stiami. 2025. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Bekasi Wahidin Septa Zahran Konteks Implementasi PKH . Karena Terletak Di Kawasan Metropolitan Jabodetabek Dan Dikenal Dijalankan." (April): 102–12.
- BPS. 2024. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023*. Praya: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. https://ppid.lomboktengahkab.go.id/download/file/LKJIP_2023_FINAL.pdf.
- Darmawan, A D. 2026. "Jumlah Penduduk Dan Persentase Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah | 2004–2025." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6a6d5912a0c5079/jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-lombok-tengah-2004-2025>.
- Fahrurrozi, Muh. 2023. "Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur , Nusa Tenggara Barat) Regional Kabupaten Lombok Timur Dilihat Dari Lombok Timur Kurun Waktu 2015-2019 Menempatkan Kabup." 29(1): 70–89.
- Haritani, Hj Hartini, and M Pd. 2025. *Hasil Kajian Proyeksi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023*.
- Nadia, Rakhman, Moh. Arief (2022). 2025. "Strategi Dinas Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2020 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi." : 1–20.
- PUSPAWATI, SUMARNI. 2026. "Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb)[Tesis Master, Tidak Dipublikasikan]." UNIVERSITAS MATARAM.
- Resnawaty, Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna. 2016. "Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan."
- Syawie, M. 2013. "Ketimpangan Pendapatan Dan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat." 18(02): 95–104.
- Widiyana, Cicik, Zaenudin Mansyur, and Baiq Ratna Mulhimmah. 2025. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara." 8: 235–48.